

SMARTLINK RUPIAH BALANCED PLUS FUND

November 2019

BLOOMBERG: AZRPBPF:IJ

Tujuan Investasi

Tujuan investasi dari dana ini adalah untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang dengan menghasilkan pendapatan yang relatif stabil.

Strategi Investasi

Untuk mencapai tujuan investasi maka dana ini diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen pasar uang dan pendapatan tetap (seperti deposito, SBI, SPN dan/atau reksadana pasar uang, obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan/atau reksadana pendapatan tetap) dengan target 25%-50% dan ke dalam instrumen-instrumen saham (baik secara langsung melalui saham dan/atau melalui reksadana saham) dengan target 50%-75%

Kinerja Portofolio

Periode 1 tahun		3,26%
Bulan Tertinggi	Sep-10	8,09%
Bulan Terendah	Agu-13	-6,74%

Rincian Portofolio

Saham	71,52%
Reksadana - Pdpt Tetap	26,75%
Reksadana - Saham	1,99%
Kas/Deposito	-0,27%

Lima Besar Obligasi

FR0068	1,77%
FR0070	1,76%
FR0056	1,75%
FR0078	1,55%
FR0080	1,50%

Lima Besar Saham

Bank Central Asia	9,07%
Bank Rakyat Indonesia	5,69%
Bank Mandiri Persero	4,60%
Telekomunikasi Indonesia	4,10%
Astra International	3,16%

Informasi Lain

Total dana (Milyar IDR)	IDR 502,03
Kategori Investasi	Moderat - Agresif
Tanggal Peluncuran	15 Jul 2009
Mata Uang	Rupiah
Metode Valuasi	Harian
Rentang Harga Jual-Beli	5,00%
Biaya Manajemen	2,00% p.a.

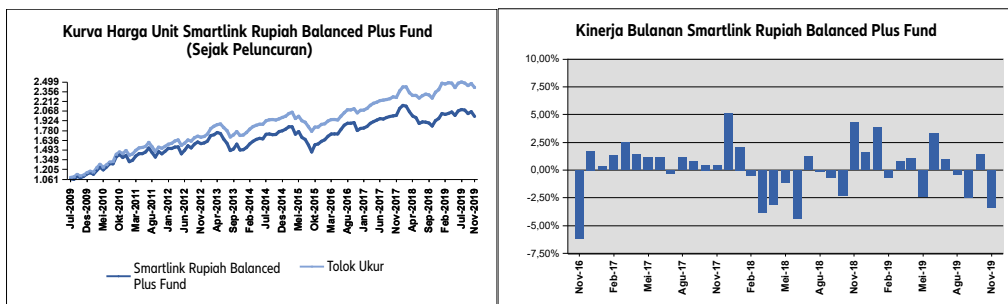
Harga per Unit	Beli	Jual
(Per 29 Nov 2019)	IDR 1.891,85	IDR 1.991,42

Dikelola oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Smartlink Rupiah Balanced Plus Fund	-3,38%	-4,46%	-0,76%	3,26%	11,71%	1,61%	99,14%
Tolok Ukur*	-2,37%	-2,62%	0,06%	2,99%	18,35%	1,34%	141,86%

*70% Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 25% Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) IDR Bond Index & 5% rata-rata deposito (3 bulan) dari Mandiri, BNI, BTN, Danamon dan CIMB Niaga

(Tolok ukur; sebelum Sep 2018: 60% Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) & 40% rata-rata deposito (3 bulan) dari Mandiri, BNI, BTN, Danamon dan CIMB Niaga)



Komentar Manajer Investasi

Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) mengumumkan inflasi di bulan November 2019 pada level bulanan +0.14% (dibandingkan konsensus inflasi +0.20%, +0.02% di bulan Oktober 2019). Secara tahunan, inflasi tercatat pada level +3.00% (dibandingkan konsensus +3.06%, +3.13% di bulan Oktober 2019). Inflasi ini berada di level tahunan +3.08% (dibandingkan konsensus +3.14%, +3.20% di bulan Oktober 2019). Inflasi ini masih dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok bahan makanan, yaitu daging, ayam dan tomat. Pada pertemuan Dewan Gubernur 20 dan 21 November 2019, Bank Indonesia mempertahankan 7-day Reverse Repo Rate pada level 5.00%, dan juga mempertahankan bunga fasilitas simpanan dan fasilitas peminjaman pada level 4.25% dan 5.75%. Kebijakan ini masih didukung oleh inflasi yang masih terkendali dan masih dalam target. Berkebalikan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menurunkan Giro Wajib Minimum ke dua kalinya di tahun ini sebesar 50 basis poin menjadi 5.50% untuk bank komersial dan menjadi 4.00% untuk bank syariah. Hal ini diharapkan dapat memberikan likuiditas pada sektor perbankan sebesar IDR 26 triliun. Rupiah melemah terhadap Dolar AS sebesar -0.67% menjadi 14,102 di akhir bulan November 2019 dibandingkan bulan sebelumnya 14,008. Neraca perdagangan Oktober 2019 mencatat surplus sebesar +161 juta dolar AS versus surplus bulan sebelumnya sebesar -160 juta dolar AS. Surplus ini dikarenakan oleh penurunan pertumbuhan impor lebih dalam dibandingkan penurunan pertumbuhan ekspor. Neraca dagangan non minyak dan gas pada bulan Oktober 2019 mencatat surplus sebesar +990 juta dolar, lebih tinggi dibandingkan bulan lalu yang mana menghasilkan surplus sebesar +601 juta dolar. Sementara itu, neraca dagang minyak dan gas masih mencatat deficit sebesar +829 juta dolar pada bulan Oktober 2019, sedikit tinggi dibandingkan deficit di bulan September 2019 sebesar -762 juta dolar. Posisi cadangan devisa Indonesia adalah sebesar USD 126.63 miliar pada akhir November 2019, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan USD 126.7 miliar pada akhir Oktober 2019.

Yield obligasi pemerintah berbasis Rupiah ditutup beragam, lebih banyak yang meningkat, kecuali untuk tenor 20 tahun. Imbal hasil yang meningkat disebabkan global sedang berada pada risk off mode, sedangkan penurunan pada tenor 20 tahun didukung oleh masuknya investor asing. Pasar lanjut bergejolak yang dipicu oleh ketidakpastian terkait perang dagang. Kesepakatan yang diharapkan setelah terjadi pembicaraan dagang fase 1 belum dilakukan karena baik Tiongkok dan Amerika Serikat belum sepakat pada masing-masing penawaran untuk kesepakatan dagang yang mana Tiongkok ingin menarik tarif impor yang telah diterapkan dan Amerika Serikat ingin Tiongkok membeli barang pertanian mereka. Tetapi terlepas dari ketidakpastian tersebut, pasar obligasi Indonesia masih didukung oleh positif katalis dari sisi domestic. Surplus neraca perdagangan Indonesia pada bulan Oktober yang menjadi alasan kenapa investor asing masih mencatat arus masuk di bulan November. Pihak asing menaikkan kepemilikan mereka sebesar +9.33 triliun Rupiah di bulan November 2019 (bulanan +0.88%), yakni ke 1,067.80 triliun per 29 November 2019 dari IDR 1,058.47 triliun per 31 Oktober 2019, yang membawa kepemilikan mereka menjadi 38.55% dari total obligasi pemerintah yang dapat diperdagangkan (38.99% di bulan sebelumnya). Yield di bulan November 2019 untuk 5 tahun meningkat +5bps menjadi +6.49% (+6.44% pada Oktober 2019), 10 tahun naik +10bps menjadi +7.11% (+7.01% pada Oktober 2019), 15 tahun naik +8bps menjadi +7.55% (+7.47% pada Oktober 2019), dan 20 tahun turun -12bps menjadi +7.56% (+7.68% pada Oktober 2019).

Indeks IHSG ditutup lebih rendah di 6,011.83 (-3.48% MoM) di bulan ini. Saham yang menjadi penghambat utama seperti HMSP, TLKM, ASII, BBRI, dan UNVR turun sebesar -9.15%, -4.38%, -6.47%, -2.85% dan -4.4% MoM. Pasar saham terkoreksi di bulan November karena sentiment dari perang dagang US-Tiongkok yang mengalami kemunduran, dimana ada kemungkinan bahwa kesepakatan dagang fase pertama akan ditunda hingga awal 2020. Dari sisi domestik, terjadinya tekanan jual oleh investor asing terhadap saham berkapitalisasi besar yang berasal dari perubahan bobot indeks MSCI dan juga beberapa berita terkait dengan intervensi pemerintah di beberapa sektor, seperti sektor Perbankan dan Utilitas (harga gas). Selain itu, tekanan jual juga terlihat dari investor domestik setelah OJK secara paksa menutup beberapa reksadana lokal yang bermasalah dengan berbagai alasan. Pada catatan yang lebih positif, pemerintah mendorong undang-undang Omnibus agar disetujui dan dilaksanakan pada 1H20 dimana akan mendukung investasi domestik dan asing yang lebih kondusif dan diharapkan mendorong perputaran siklus belanja modal. Dari sisi sektor, Sektor Pertambangan mencatat performa paling buruk di bulan ini, turun sebesar 9.52% MoM. DKFT (Central Omega Resources) dan PSAB (J Resources Asia Pacific) menjadi penghambat utama, terdepresiasi sebesar 34.65% dan 33.22% MoM. Hal ini diikuti oleh Sektor Konstruksi, Perumahan dan Real Estat yang naik sebesar 7.62% MoM. COWL (Cowell Development) dan RODA (Pikko Land Development) mencatat penurunan sebesar 75.49% dan 69.81% MoM. Di sisi lain, Sektor Industri Dasar mencatat performa paling baik di bulan ini, mencatat keuntungan sebesar 1.32% MoM. BRPT (Barito Pacific) dan APLI (Asiaplast Industries), menjadi pendorong utama, naik sebesar 43.16% dan 29.17% MoM.

Disclaimer:

Smartlink Rupiah Balanced Plus Fund adalah produk unit-link yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz). Informasi ini disiapkan oleh Allianz dan digunakan sebagai keterangan saja. Kinerja dana ini tidak dijamin, nilai unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu dan prediksi masa depan tidak merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Allianz tidak menjamin atau meniadakan patokan atas penggunaan / hasil atas penggunaan angka-angka yang dikeluarkan dalam hal kebenaran, ketelitian, kepastian atau sebaliknya. Anda disarankan meminta pendapat dari konsultan keuangan Anda sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.